

Pendapatan Asli Daerah- Realisasi PAD Capai 58 Persen, Pemkot Parepare Gelar Monev Triwulan Ke II



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/07/15/realisasi-pad-capai-58-persen-pemkot-parepare-gelar-monev-triwulan-ke-ii/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan triwulan ke II tahun anggaran 2024.

Rapat monev itu, dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin, 15 Juli 2024. Hadir pula, Sekretaris Daerah Husni Syam, asisten, staf ahli pimpinan SKPD, dan Kepala Bappeda Kota Parepare Zulkarnaen Nasrun.

Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali mengatakan, monev ini untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang didapatkan.

Selain itu, Akbar Ali menjelaskan, monev ini juga untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan, mengetahui efektifitas pelaksanaan pekerjaan, dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul,” katanya.

“Kita melihat permasalahan yang perlu kita atasi. Khususnya dalam perhitungan program, kegiatan maupun realisasi pencapaian anggaran, baik fisik maupun non fisik. Serta bagaimana terkait masalah pencapaian dalam hal pendapatan asli dan sistim manajemen keuangan kita,” katanya.

Menurutnya, untuk pendapatan daerah sekitar Rp930 miliar 783 juta lebih dan realisasi hingga Juni 2024 sebesar Rp475 miliar 204 juta lebih atau sebesar 51,05 persen.

“Namun jika saya lihat ini, ada beberapa baik dari sektor pajak mau retribusi belum maksimal. Padahal sudah ada perda retribusi dan pajak,” jelasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan triwulan ke II tahun anggaran 2024.

Rapat monev itu, dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin, 15 Juli 2024. Hadir pula, Sekretaris Daerah Husni Syam, asisten, staf ahli pimpinan SKPD, dan Kepala Bappeda Kota Parepare Zulkarnaen Nasrun.

Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali mengatakan, monev ini untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang didapatkan.

Selain itu, Akbar Ali menjelaskan, monev ini juga untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan, mengetahui efektifitas pelaksanaan pekerjaan, dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul,” katanya.

“Kita melihat permasalahan yang perlu kita atasi. Khususnya dalam perhitungan program, kegiatan maupun realisasi pencapaian anggaran, baik fisik maupun non fisik. Serta bagaimana terkait masalah pencapaian dalam hal pendapatan asli dan sistim manajemen keuangan kita,” katanya.

Menurutnya, untuk pendapatan daerah sekitar Rp930 miliar 783 juta lebih dan realisasi hingga Juni 2024 sebesar Rp475 miliar 204 juta lebih atau sebesar 51,05 persen.

“Namun jika saya lihat ini, ada beberapa baik dari sektor pajak mau retribusi belum maksimal. Padahal sudah ada perda retribusi dan pajak,” jelasnya.

Diketahui, Perangkat Daerah dengan capaian kinerja Fisik tertinggi yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian kinerja 78,31 persen, RSUD Andi Makkasau dengan capaian 72,50%1 persen dan Dinas Sosial dengan capaian kinerja 64,83 persen. (*)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/07/15/realisasi-pad-capai-58-persen-pemkot-parepare-gelar-monev-triwulan-ke-ii/>

2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.